

SKRIPSI

**PENERAPAN PEMBATAHAN YUDISIAL (*JUDICIAL RESTRAINT*)
BAGI PELAKU LGBT (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XIV/2016)**



Disusun Oleh :

EVAN WIJAYA

NIM : 02114128

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2018

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tanggal 4 Agustus 2018.

TIM PENGUJI

SOEMALIS.H., M.H.

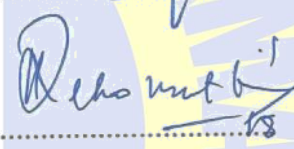
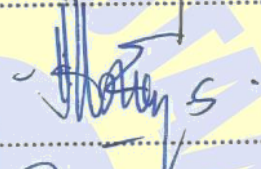
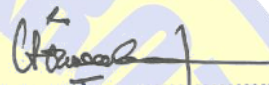
KETUA

WIDYAWATI BOEDININGSIH, S.H., M.H.

SEKRETARIS

TUTIEK RETNOWATI, S.H., M.Hum.

ANGGOTA




LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah Direvisi

Pada tanggal 08 Agustus 2018

Oleh Dosen Pembimbing :



Widyawati Boediningsih S.H.,M.H

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama**

PRO PATRIA



Tahegga Primananda Alfath, SH., MH.

Lembar Persetujuan

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 08 Agustus 2018**

Oleh Dosen Pembimbing :



Widyawati Boediningsih, S.H., M.H



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Narotama

PRO PATRIA



Tahegga Primananda Alfath, SH., MH.

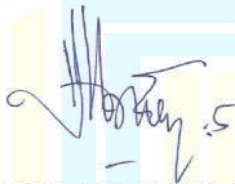
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI DENGAN JUDUL;
**PENERAPAN PEMBATAHAN YUDISIAL (*JUDICIAL RESTRAINT*) BAGI PELAKU
LGBT (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-
XIV/2016)**

LAYAK UNTUK DILAKUKAN SIDANG UJIAN SKRIPSI

SURABAYA , 2 AGUSTUS 2018

DOSEN PEMBIMBING



WIDYAWATI BOEDININGSIH, S.H., M.H.

MENGETAHUI,

KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



TAHEGGA PRIMANANDA ALFATH, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

NAMA : EVAN WIJAYA
N I M : 02114128
Tanggal Penilaian : 4 Agustus 2018
Judul Skripsi : Penerapan Pembatasan Yudisial (*Judicial Restraint*) Bagi Pelaku LGBT (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XIV/2016)

Pembimbing : Widyawati Boediningsih, S.H., M.H.

PANITIA PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Soemali, S.H., M.H.	
SEKRETARIS	Widyawati Boediningsih, S.H., M.H.	
ANGGOTA	Tutiek Retnowati, S.H., M.H.	

PRO PATRI

Surabaya,
Pembimbing,

Widyawati Boediningsih, S.H., M.H.

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 08 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan



EVAN WIJAYA
NIM : 02114128

PRO PATRIA

ABSTRAK

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara penegak konstitusi diperlukan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertindak melakukan aktivitas judicial sebagai positif legislator atau melakukan pembatasan yudisial sebagai negatif legislator. Lesbian, Gay, Bisexual dan transgender yang selanjutnya dapat disingkat LGBT merupakan salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji dari segi yuridis. Kepastian hukum diperlukan dalam solusi penyelesaian kasus LGBT yang telah marak di masyarakat.

Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, LGBT, positif legislator, negatif legislator, kepastian hukum.



ABSTRACT

The existence of the Constitutional Court as a constitutional enforcement state institution is required to conduct judicial review of the Constitution State Law. In carrying out its duties and obligations acting in judicial activity as a positive legislator or performing judicial restrictions as a negative legislator. Lesbian, Gay, Bisexual and transgender hereafter abbreviated LGBT is one interesting phenomenon to be studied in terms of juridical. Legal certainty is needed in the solution of the LGBT case that has been rampant in the community.

Keywords: Constitutional Court, LGBT, positive legislators, negative legislators, legal certainty.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya.....	1
1.2 Penjelasan Judul.....	8
1.3 Alasan Pemilihan Judul.....	9
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika.....	13
BAB II PENYIMPANGAN SEKSUAL YANG BERKAITAN DENGAN NORMA- NORMA YANG ADA DALAM MASYARAKAT.....	15
2.1 Pengertian Penyimpangan Seksual	15
2.2 Faktor Penyebab Penyimpangan Seksual.....	20

2.3 Analisa Penyimpangan Seksual.....	20
2.4 Dampak Penyimpangan Seksual	29
2.5 Perbedaan Cara Pandang LGBT.....	33
BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA LGBT.....	36
3.1 Dasar Pertimbangan Putusan MK.....	36
3.2 <i>Dissenting Opinion</i> (Pendapat Berbeda).....	41
3.3 Kewenangan MK secara Yuridis Empiris.....	43
3.4 Kewenangan MK secara Yuridis Normatif	47
BAB IV PENUTUP.....	52
4.1 KESIMPULAN.....	52
4.2 SARAN	52
DAFTAR PUSTAKA	

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. LGBT yang merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual dapat dikatakan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Norma-norma tersebut antara lain norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum. Inti dari permasalahan tersebut adalah karena bertentangan dengan ajaran nilai etika, moral dan Pancasila sebagai filosofi landasan dasar negara.
2. Putusan hakim dalam memutus perkara LGBT yang menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pemohon sudah tepat dan sesuai dengan kepastian hukum. Penerapan pembatasan yudisial (*judicial restraint*) sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim MK sudah tepat karena upaya tersebut dilakukan untuk menegakkan nilai-nilai konstitusi dan sudah sesuai dengan ideologi dasar negara yaitu Pancasila.

4.2 Saran

1. Lembaga legislatif (DPR) agar segera merumuskan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kebijakan politik hukum pidana tentang LGBT yang dimohonkan oleh pemohon agar tidak bertentangan dengan nilai konstitusi

2. Agar para hakim di lembaga peradilan memegang integritas dalam mewujudkan nilai-nilai filosofi yang terwujud dalam konstitusi demi tercapainya kepastian,keadilan dan kemanfaatan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011

Dianawati, Ajen, *Pendidikan Seks Untuk Remaja*, Kawan Pustaka, Jakarta, 2006

Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1992

Junaedi, Didi, *17+: Seks Menyimpang*, Semesta Rakyat Merdeka, Jakarta, 2010

Latif, Abdul, dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2009

Mahfud MD, M., *Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2003

Marpuang, Leden, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009

Mertokusumo, Sudikno, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja-Grafindo, Jakarta, 2010

Sarwono, Sarlito, *Psikologi Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Soekanto, Soerjono dkk, *Penelitian Hukum Normatif : suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan Huma, Jakarta, 2003

2. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 *j.o* Undang-Undang nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

3.Lain-lain

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-XIV/2016

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#WmBh-LpuK1N>, pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 16.04 WIB

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=14202#WqDs2kxuLOY>, pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 13.17 WIB

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a32af7a950cd/dalih-wewenang-pembentuk-uu--mk-tolak-perluasan-pasal-perzinaan>, pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 18.54 WIB

<http://www.saldiisra.web.id>, pada tanggal 4 Februari 2018 pukul 15.43 WIB.

<https://suaramuslim.net/siapa-bilang-mk-tidak-dapat-membuat-norma-baru/>, pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 19.32 WIB.

Fariul Ibnu Huda, *Perilaku Seksual Kaum Gay dalam Tinjauan Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Syariah IAIN Salatiga, 2015.

Gita Annisa Rahmalia Fajriani, *Gambaran Social Well Being Pada Homoseksual Dewasa Muda Yang Melakukan Coming Out*, Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia, 2013.

M.Guntur Hartotrisno, *Analisis Kriminologis terhadap Penyimpangan Seksual Sesama Jenis Oleh Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Wayhui Lampung Selatan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.

Setiawan, Wawan, dkk, *Peran Pancasila pada Era Globalisasi “Kajian terhadap Pancasila dan Fenomena LGBT di Indonesia”*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya Volume 19, 2017.

Syukri Asy'ari, dkk, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Jurnal Konstitusi Volume 10, 2013.